DAFTAR REFERENSI

Buku

Akhmad Solihin. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*. Bandung: Nusa Aulia, 2010.

Arief, B.N. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Chairul Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.2019, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Tanjungpinang:Fakultas Prodi Ilmu Hukum.

Friedman, Lawrence M. Law and Society An Introduction, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977) dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal.225

Hamzah, A. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

John M. Echols dan Hassan Shadily. 2002. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kansil C.S.T., dan Christine S.T Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha.

Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.

Krisna Fery Rahmantya dkk. 2016. *Potensi dan Perikanan Kabupaten Natuna*. Jakarta. Pusat Data, Statistik, dan Informasi.

Lopa, B. 1991. *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Grafika.

Mahmudah, N. 2015. *Illegal fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

Parthiana, W. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.

Partihana,W. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya.

Prasetyo, T. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rokhimin. 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Sukriono, D. (2010). *Hukum, Konstitusi dan Otonomi*. Malang: Setara Press, hlm. 43

Tanty S. Reinthart Thamrin, *Penegakan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing*, Kertas Kerja Lemhanas RI.Jakarta,2014

Skripsi

Iwan. 2019. *Dampak Tindakan Illegal fishing Terhadap Kesejahteraan Masyararakat*. Skripsi, Bandung: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, UIN Sunan Gunung Djati

Yudi Dharma Putra, 2018. *Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Skripsi.Malang: Universitas Bandung.

Pambudhi Risth, 2017.*Eksekusi Penenggelaman Kapal Yang Berbendera Asing Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal.* Thesis. Malang: Universitas Bandung

Jurnal

Afandi Idrus, *Kajian Hukum Terhadap Pencurian Ikan Dilaut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.* Lex Privatum,Volume 5 No.5,2017.hlm.120

Chairun Nasirin. dan Dedy Hermawan, *Kontraversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing Indonesian*. Sepirit Publik, Volume 12 No.1, 2017. hlm. 4

Desi Yunitasari, *Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi UNCLOS 1982*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 8, No. 1, 2020. hlm. 89

Efritadewi A. dan Jefrizal W. 2017. *Penenggelaman Kapal Illegal fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*. *Jurnal Selat*, Volume 4 No.2, hlm. 270.

Haryanto dan Setiyono. 2017. *Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Persfektif Hukum Pidana InternasionaL*. *Law Reform Journal*, Volume 13 No.1,. hlm. 79

Irmawanty,D.N dan Arif.B.N,Urgensi Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pemidanaan.*Pembangunan Hukum Pidana*,Volume 3 No.2,2021,hlm.220

Jamilah Asiyah Dan Disemadi Hari Sutra, *Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif Unclos 1982* . Mulawarmanlawreview. Volume 5 Issue 1, June 2020, Hal.32

Leatmia wilshen dan Marthen Ricky, *Problematika Hukum Dalam Penanggulangan Illegal Fishing di Provinsi Kepulauan Maluku. Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 6 No.11,2021,hlm 66

Lestari Maria Maya, P*enegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negri Medan.Ilmu Hukum*,Volume 3 No.2, 2018. hlm.285

Maryani Halimatul dan Nasution Adawiyah, *Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia,* Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 3, 2019, Hal. 385

Nurcahyawan, Teddy dan Saputra Leonardo, *Penegakan Hukum Dan Penenggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing),* Era Hukum, Volume 2, No. 1, Juni 2017, Hal 353

Putri Marisa Nur, *Penegakan Hukum Atas Penangkapan Ikan Secara Illegal Yang Melibatkan Negara Lain*. Multidisciplinari Studies, Volume 11 No.1 2020, hlm.8

Sasana Hadi, Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.*Ekonomi Pembangunan*,Volume 10 No.1 2019,hlm.108

Sigit R.,N,*Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum Di Perairan Natuna Yang Di Lakukan Oleh Kapal Asing Vietnam Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional*. Selat,volume 7 No.1, 2019.hlm 14-15

Sutoyo, *Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Vol 4, No 1, 2017 hlm.79-92

Undang – undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Internet

Muhammad Ikhsan. 2021. Vakum di Era Edhy, *Kapal Illegal fishing di Natuna Kembali Ditenggelamkan***.** https://www.batamnews.co.id/berita-75072-vakum-di-era-edhy-kapal-illegal-fishing-di-natuna-kembali-ditenggelamkan.html. diakses pada 06/04/2021, Pukul 14.32 WIB.